

ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KOPERASI (PENDEKATAN SISTEM INFORMASI STUDI KASUS KOPERASI SETIA BHAKTI WANITA di SURABAYA)

by Martinus Sony Erstiawan Tony Soebijono

Submission date: 12-Feb-2021 04:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 1507434855

File name: GCG.Develop.pdf (147.54K)

Word count: 6783

Character count: 46805

**ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA KOPERASI
(PENDEKATAN *SISTEM INFORMASI* STUDI KASUS KOPERASI SETIA BHAKTI
WANITA di SURABAYA)**

Martinus Sony Erstiawan¹ Tony Soebijono²
Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya
martinus@stikom.edu¹, tony@stikom.edu²

Abstrak

Kesejahteraan masyarakat dipandang perlu untuk peningkatan dari segi perekonomian, yang menjadi dasar mengapa koperasi muncul dan berkembang dan bersaing dengan kompetitor, sehingga dibutuhkan sistem organisasi yang mendasari untuk pengelolaan koperasi yang menciptakan suasana koperasi yang baik, profesional, tangguh, mandiri, bertanggungjawab, transparan didukung dengan pemanfaatan teknologi dengan menciptakan efisien dan efektifitasnya pengendalian di koperasi dan dapat meningkatkan SHU bagi anggota koperasi. Sistem tanggungjawab yang dikenal oleh koperasi setia bhakti wanita dibuktikan dengan NPL 0 (nol).

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian menggunakan pendekatan reseaserch and development (RnD) dengan menggunakan analisis deskriptif. Strategi pengumpulan data menggunakan quisioner (uji realibilitas dan validitas), observasi dan wawancara. Teknik analisis data dimana elemen *Good Corporate Governance* (GCG) transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan serta sistem informasi menggunakan skala linkert.

Hasil yang diperoleh bahwa sistem informasi memperoleh rata-rata 2.52 terlaksana namun belum menjadi prioritas dalam kemudahan mem peroleh informasi dan penggunaan teknologi informasi, partisipasi anggota 4.20, cukup baik dalam mewujudkan koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota, prinsip transparansi memperoleh rata-rata 4,02 dapat diterlaksana dengan baik dan cukup terwujud, pelaporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan disampaikan di RAT dan dukungan dari sistem tanggungjawab yang menjadi tata nilai dalam musyawarah mufakat. Independensi dengan indeks 3,83 cukup terwujud dengan pengelolaannya, prinsip responsibility pengelolaan koperasi menjadikan modal awal membangun koperasi. Prinsip akuntabilitas dengan indeks 3,71 dapat terlaksana dengan baik, struktur organisasi yagn dipertanggungjawabkan secara etis, dengan dilakukan pengawasan kinerja operational dalam pertanggungjawaban usaha,tanggungjawab pengurus bila anggota tidak lancer dalam melakukan pembayaran pinjaman serta bila ada penyalahgunaan uang operasional, melalaikan tugas, melakukan tugasnya tidak dengan hati-hati menjadi tanggungjawab bersama dan kinerja pengurus dapat dinilai dari keberhasilan laba dan penignkatan SHU serta jumlah anggota. Prinsip kewajaran serta kesetaraan 3,94 terlaksana dengan baik, karena tidak ada perbedaan unsur SARA.

Kata Kunci : Koperasi, *Good Corporate Governance*, *Sistem Informasi*

1. Pendahuluan

Peran koperasi di sektor perekonomian dapat menumbuhkan minat tenaga kerja manusia untuk berkarya mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Koperasi merupakan usaha mandiri sekumpulan orang yang memiliki prinsip kekeluargaan, keterbukaan dan adil bagi anggota yang berperan dalam pengembangan koperasi yang bersifat sukarela ketika menjadi salah satu anggota.

Pengelolaan manajemen koperasi didasarkan pada aturan yang berlaku diantaranya AD/ART, kebijakan, struktur organisasi, peran dan aturan yang memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan jobdesk dari para pengurus, pengawas dan pengelola dilakukan secara tersistem dalam menjalankan koperasi yang berlandaskan visi dan misi serta tata kelola (Good Corporate Governance) koperasi yang transparan, mandiri, memiliki akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajiban. Serta kurangnya perhatian sistem informasi dalam pengembangan diri koperasi untuk mempermudah informasi dan mempermudah pengelolaan koperasi sehingga pengambilan keputusan lebih cepat..

Penerapan sistem Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan pada koperasi penting dilakukan agar dalam pengelolaan koperasi dapat merubah sistem organisasi, dengan tujuan adalah menciptakan kinerja, pengendalian internal yang baik dan mengurangi kelemahan tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel serta memiliki hubungan yang baik bagi *stakeholder* serta *shareholder* dan didukung dengan sistem informasi yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi lebih bermanfaat dan efisien.

2. Tinjauan Literatur

2.1. Prinsip, nilai dan ciri pada Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip yang wajib ditindaklanjuti dan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 diantaranya : a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, b) pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis, c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen, e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi, f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegaitan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dan g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Ciri koperasi di Indonesia menurut susanto (2015) diantaranya (a) koperasi merupakan kumpulan beberapa orang dan bukan kumpulan modal. (b) Semua kegiatan yang terjadi didalam koperasi dilakukan dengan bekerja sama dan bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban anggotanya yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial, (c) Kegiatan yang terjadi didalam koperasi didasari pada kesadaran para

anggota, bukan atas dasar intimidasi, ancaman atau campur tangan dari berbagai pihak lain yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi. (d) Tujuan pada koperasi intinya adalah untuk kesejahteraan dan kepentingan bersama para anggotanya.

2.2.Prinsip GCG

Prinsip GCG dalam Kaihatu (2006) antara lain : 1.) *Transparency* (Keterbukaan Informasi), merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.; 2.) *Accountability* (Akuntabilitas) merupakan kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 3.) *Responsibility* (Pertanggungjawaban), merupakan kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, 4.) *Independency* (kemandirian) merupakan keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5.) *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran) merupakan perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.3.Mekanisme GCG

Mekanisme corporate governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi menurut Arifin (2005) dalam Purno (2013). Buediono (2005) dalam Purno pun mengatakan bahwa mekanisme corporate governance merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah agency. Lain halnya Lastanti (2004) dalam Purno (2013) mengatakan bahwa mekanisme pengawasan corporate governance dibagi dalam dua kelompok diantaranya mekanisme internal dan eksternal. Pada mekanisme internal merupakan cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan mekanisme eksternal merupakan cara memengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar.

2.4.Elemen Pendukung Efektivitas Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Iskandar dan Suryono (2015) Good Corporate Governance pada dasarnya memberikan arahan kepada pengurus perusahaan agar dalam mengejar keuntungan dan mengembangkan usahanya, perusahaan juga harus dikelola secara etis dan bertanggung jawab, dan tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial belaka.

2.5.Sistem, Prinsip elemen dan elemen yang membentuk sebuah sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2016) Sistem merupakan Perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Prinsip elemen dalam sistem (1.) Obyek : Berupa bagian, elemen ataupun variabel. Dapat berupa benda fisik,

abstrak ataupun keduanya sekaligus tergantung kepada sifat sistem tersebut, (2.) Atribut : Menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan obyeknya. (3.) Hubungan internal : diantara obyek yang terdapat didalamnya. (4.) Lingkungan : Tempat dimana sistem berada.

Elemen yang membentuk sebuah sistem diantaranya : (1) Tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan. Tujuan menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tujuan sistem menjadi tidak terarah dan tidak terkendali, tentu saja tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. (2) Masukan. Masukan (input) merupakan segala sesuatu yang masuk kedalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal yang berwujud yang nampak secara fisik maupun yang tidak tampak. (3) Proses. Merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. (4) Keluaran. Keluaran (Output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan dan sebagainya. (5) Batas. Pemisah antara sistem daerah diluar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup atau kemampuan sistem. (6) Mekanisme pengendalian dan umpan balik. Diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (Feedback) yang mencuplik keluaran. Umpan balik digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Dengan tujuan untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. (7) Lingkungan. Merupakan segala sesuatu yang berada diluar sistem. Lingkungan dapat berpengaruh pada operasi sistem dan dapat merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugi tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi tersebut, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.

2.6.Perspektif sistem dan koperasi

Menurut Laudon (2005) teknologi informasi merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengelola dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. Teknologi komunikasi digunakan sebagai alat untuk penyaluran informasi sedangkan informasi diolah dan disimpan melalui komputer. Sistem informasi yang ada pada koperasi sangat penting didukung oleh sistem teknologi informasi guna menunjang kelancaran operasional yang telah diintegrasikan disegala lini bagian sehingga dapat memberikan pelayanan kepada pihak yang membutuhkan dan dapat mengatasi permasalahan serta menunjang pengambilan keputusan.

Menurut Mas'ud Effendi (2016) menyatakan bahwa perspektif sistem merupakan usaha untuk memberikan penjelasan yang relatif sederhana tentang sekelompok keadaan yang kompleks dan berada diluar suatu kategori yang sudah ada atau ditiadakan. Maksud dari pernyataan tersebut sistem dapat menyajikan sekelompok pernyataan tentang ciri-ciri hakiki dari suatu sistem yang didalamnya menjelaskan kaitan, hubungan elemen antar lingkungan sistem. Pada koperasi, perspektif sistem informasi dapat menjadi pokok perhatian dalam aktivitas proses dan kejadian yang memiliki interaksi untuk mencapai tujuan tertentu yang mengubah fungsi input menjadi output.

2.7.Sistem dan Good Corporate Governance

Perkembangan Sistem Informasi saat ini berada pada titik yang penting bagi pengambilan keputusan disegala bidang bisnis apabila perusahaan ingin bertahan dan berhasil

dalam jangka waktu yang lama. Keberlanjutan akan kehidupan perusahaan dimasa datang tidak luput pula peran dari pengembangan strategi bisnis yang didukung sistem informasi dan teknologi dalam tekanan kompetitor yang semakin memiliki strategi pasar dan pengembangan produk dan manajemen yang dapat bersaing dipasar yang kompetitif. Tekanan yang dialami oleh tiap pebisnis dalam menjalankan bisnisnya : (1.) Persaingan dari para pesaing dalam industrinya, (2.) Ancaman pemain baru dalam industri dan pasarnya, (3.) Ancaman yang dihadapi karena adanya produk pengganti yang dapat mengambil pangsa pasar, (4.) daya tawar pelanggan, (5.) Daya tawar pemasok.

Sistem teknologi dapat dimanfaatkan melalui teknologi informasi yang dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan, mempercepat dan mengefektifkan proses bisnis perusahaan dan meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM. Dalam menjawab tantangan yang ingin dicapai tersebut menurut Ahmadjayadi dalam Schwarz (2008) dalam menghadapi era pasar bebas sistem dan teknologi informasi dapat membantu merealisasikan era pasar bebas, tantangan yang dapat membantu tersebut dimana perusahaan dapat mengelola dan bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut menggunakan sistem informasi dan teknologi diantaranya : (a.) Kepuasan Konsumen, (b.) Good Corporate Governance, (c.) Peningkatan Bisnis, (d.) Optimalisasi Proses Bisnis, (e.) Memiliki Kemitraan, (f.) Memiliki penunjang yaitu SDM yang berkualitas.

3.Hasil Penelitian

Dengan melakukan penelitian pada kegiatan koperasi Setia Bhakti Wanita (SBW) dengan tujuan untuk mengkaji implementasi *Good Corporate Governance* pada koperasi SBW dengan melakukan penyebaran quisioner dan wawancara kepada pengurus dan anggota koperasi serta karyawan sebagai dasar penelitian yang dilakukan penulis tentang implementasi *Good Corporate Governance dalam perspektif sistem informasi*. Maka diperoleh informasi dari hasil pengumpulan data sebagai berikut :

3.1.Sistem Informasi

Keterbukaan pengelolaan sebuah organisasi diperlukan dan dibutuhkan oleh manajemen dalam mengelola dana anggota menjadi informasi yang digunakan oleh seluruh anggota koperasi. Sistem informasi penting bagi perusahaan bagi yang sedang melakukan transaksi, dapat mengurangi kesalahan dalam kepengurusan berkas dan aktivitas apapun lebih mudah, cepat dan akurat serta dapat menghemat waktu dalam mencari file yang dibutuhkan. Dapat merencanakan dan menentukan kegiatan dan aktivitas dimasa depan. Serta dapat mengurangi biaya operasional berkaitan dengan alat tulis peralatan kantor.

Sistem merupakan keterkaitan antar komponen sedangkan sistem informasi merupakan kumpulan komponen dalam perusahaan atau organisasi dalam rangka menghasilkan proses penciptaan dan penganaliran informasi sehingga informasi manajemen dibutuhkan keseimbangan antar komponen dalam menghasilkan sesuatu sistem informasi sesuai kebutuhan (Sidh.2013). Menurut Gus Ihsan (2016) mengatakan sistem merupakan kesatuan yang terdiri dari satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan seperti halnya sebuah organisasi atau perusahaan akan keberhasilan dalam pengelolaannya sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah menjadi berarti bagi pengguna. Informasi dapat mengurangi

ketidakpastian dalam suatu proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan dan dapat bernilai serta bermanfaatnya lebih efektif.

Keterkaitan sistem informasi dengan *brainware* yang memanfaatkan perangkat komputer atau sistem pengolahan data sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksploitasi kemampuan dari hardware dan software secara maksimal. Menurut Sidh (2013) Komponen brainware tidak dapat terpisahkan dari komponen lainnya (Hardware dan Software) dalam sebuah sistem informasi manajemen sebagai hasil dari perencanaan, analisis, perancangan dan strategi implementasi yang didasarkan pada oleh sumber daya manusia (SDM). Keterlibatan SDM sebagai pemantau, pengoperasian dan penggunaan sistem informasi dengan berinovasi dapat memberikan dampak manajemen dalam menentukan tingkat kesuksesan perusahaan. Inovasi yang menjadikan teknologi informasi menjadi pemegang peran penting dalam informasi yang dibutuhkan. Dengan dukungan dana untuk investasi oleh koperasi dalam mengembangkan sistem teknologi dapat berguna mendukung operasional koperasi.

Menurut Atmoko (2016) prosedur atau yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku serta dapat menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian serta menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis dan menerapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja.

Penggunaan sistem informasi dalam pengolahan koperasi dibutuhkan integrasi teknologi yang mendukung dengan perangkat yang baik dalam mengoperasionalkan software dan hardware agar lebih berkembang dan produktif dalam pelaksanaan pengendalian intern yang efisien dan efektif dapat meningkat sehingga dapat menghasilkan serta meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi dan meningkatkan kinerja koperasi sesuai dengan prosedur dan pedoman. Integrasi merupakan jalur yang penting dalam sistem dibawah fungsi dan arus informasi pada departemen yang terdapat dalam koperasi. Dan dengan adanya integrasi dapat mendorong pengurus koperasi membagikan informasi yang dihasilkan dan disampaikan kepada berbagai personel pada departemen yang memerlukan, disertai dengan konsistensi kebijakan, prosedur dan pedoman dikoperasi. Dari pedoman dan prosedur ini dapat menjamin mutu dari sebuah organisasi yang telah terstandarisasi dan tersertifikasi 9001-2008 yang merupakan standar manajemen mutu organisasi yang diakui oleh internasional.

3.2.Sistem informasi dan sistem tanggungrenteng

Menurut Faidah (2014) Sistem tanggungrenteng memiliki unsur diantaranya a.) kelompok tanggun renteng yang keberadaannya harus dibuktikan dengan adanya aktivasi pertemuan kelompok yang dilakukan secara rutin. b.) adanya kewajiban seorang anggota koperasi dalam berpartisipasi aktif dalam koperasi baik berupa permodalan, partisipasi organisasi, maupun partisipasi dalam memanfaatkan jasa usaha yang ada dikoperasi. c.) peraturan dalam kelompok wajib menjaga hubungan antar anggota dalam kelompok, serta menjaga eksistensi kelompok tanggunrenteng. Menurut Supriyanto (2011) sistem tanggungrenteng merupakan sistem tanggungjawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Terdapat pula tata nilai kearifan dalam penerapan tanggungrenteng diantaranya

Kebersamaan, Kejujuran dan keterbukaan, saling percaya, musyawarah, kedisiplinan, tanggungjawab. Menurut Haryono (2017) dalam Koran Sindo menyampaikan bahwa kinerja koperasi dengan *core business financial engineering* tersebut juga terus bertumbuh pesat karena salah satu tingkat *Non Performed Load (NPL)* mencapai 0 (No) %. Sistem informasi dapat dikombinasikan dengan sistem tanggungrenteng dukungan teknologi informasi dapat mempermudah aktivitas kelompok dalam usaha yang ada dikoperasi SBW. Teknologi informasi seharusnya dapat membantu koperasi menyampaikan seluruh informasi dan seluruh kegiatan beserta informasi tagihan simpan pinjam anggota, pendaftaran keanggotaan baru, dan lain sebagainya. Dengan informasi penggunaan teknologi informasi dapat memperoleh informasi kegiatan di koperasi dan untuk kegiatan kelompok tetap dilakukan hanya saja penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah anggota dalam melakukan simpan pinjam, pendaftaran dan lainnya dan teknisnya tetap saja melakukan kegiatan kelompok namun ditunjang teknologi informasi dapat mempermudah anggota, penanggungjawab dan pengurus dalam aktivitas seluruh anggota.

Menurut peneliti penggunaan teknologi informasi seharusnya dapat membantu koperasi menyampaikan seluruh informasi dan seluruh kegiatan beserta informasi tagihan simpan pinjam anggota, pendaftaran keanggotaan baru, dan lain sebagainya. Dengan informasi penggunaan teknologi informasi dapat membantu anggota dalam memperoleh informasi kegiatan di koperasi dan untuk kegiatan kelompok tetap dilakukan hanya saja penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah anggota dalam melakukan simpan pinjam, pendaftaran dan lainnya dan teknisnya tetap saja melakukan kegiatan kelompok namun ditunjang teknologi informasi dapat mempermudah anggota, penanggungjawab dan pengurus dalam aktivitas seluruh anggota. Dengan teknologi anggota dapat mengontrol kinerja dari pengurus selama periode yang diamanatkan. Tidak hanya memperoleh kemudahan namun diperlukan kreativitas dan inovasi yang menjadi bagian dalam strategi untuk mempertahankan serta mengembangkan eksistensi ditengah persaingan pasar koperasi dan pasar keuangan yang lebih kompetitif. Dan koperasi dapat menjaring anak-anak muda (wanita) untuk dapat memanfaatkan koperasi sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya teknologi informasi dapat memberikan dampak efisiensi bagi koperasi dalam penggunaan ATK (alat tulis kantor) dan dapat memberikan ciri koperasi SBW dengan sistem tanggungrenteng dan ditunjang sistem informasi yang baik koperasi tetap eksis dimasa depan.

Teknologi informasi mendukung aktivitas akuntansi hingga data laporan keuangan dapat disajikan dengan baik dengan bantuan teknologi informasi. Dengan keterbukaan era digital dan informasi dapat dimanfaatkan pengelola (pengurus) dalam menyampaikan atau menampilkan laporan keuangan melalui online yang terhubung dengan website <http://setiabaktiwanita.com>. Menurut Ardi (2013) menyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi dapat mempengaruhi perkembangan sistem informasi akuntansi (SIA), dengan perkembangan pemrosesan data, pengendalian internal perusahaan dan peningkatan kuantitas dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Menurut Taufiq (2017) pengaruh TI dalam bidang akuntansi memberikan dampak terhadap profesi akuntan yang semakin dibutuhkan, dengan konsekuensi mampu mengembangkan konsep yang jelas dan selaras terhadap perkembangan teknologi informasi dalam kebutuhan manajemen baik dalam

level manajemen maupun area fungsional yakni para pengambil keputusan atau para manager.

Pengelolaan dana koperasi yang dilakukan karyawan koperasi menggunakan proteksi (password) dalam pengelolaan data terhadap informasi penting yang tidak dimiliki hak otorisasi dan penggunaan konektivitas jaringan internet LAN dan WLAN. Penggunaan hak akses (password) diperlukan batasan dan prioritas dalam pemanfaatan data guna pengambilan keputusan untuk mengurangi keamanan sistem informasi dan keamanan data yang ada. Menurut Purwanto (2005) pengamanan data/informasi yang tersimpan di komputer sangatlah penting karena informasi merupakan aset yang tidak ternilai harganya bagi diri pribadi maupun bagi perusahaan, karena lewat informasi tersimpan nyawa perusahaan. Dalam pengamanan sistem data/informasi di komputer sebaiknya dibuat berlapis-lapis hal ini menghindari terlalu mudahnya sistem itu dapat ditembus, paling tidak memerlukan waktu (mengulur waktu) bagi orang-orang yang mencoba menyalahgunakan data yang ada di komputer bersangkutan. Menurut Peneliti dukungan LAN dan WLAN dalam aktivitas koperasi dapat dimanfaatkan jangka panjang yang memerlukan kecepatan tampilan informasi bagi anggota dan pengguna dan yang memiliki mobilitas tinggi dalam meningkatkan layanan dan produktivitas. Keamanan LAN dan WLAN dapat ditingkatkan agar keamanan data dan jaringan internet dapat terjamin.

Penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pembayaran angsuran anggota melalui fasilitas m-banking dan pemanfaatan teknologi dalam pendaftaran sebagai anggota. Penggunaan e-banking dapat mempermudah dalam pembayaran simpan pinjam. Tidak hanya itu saja, e-banking dapat memberikan dampak efisien waktu dalam melakukan antrian simpan pinjam. Penggunaan teknologi informasi sangat membantu organisasi yang telah lama berlangsung dan dapat menjadi bagian dari efisiensi kerja dan mengurangi biaya serta dapat meningkatkan efektifitas, dapat bermanfaat, menjadikan pekerjaan lebih mudah dan dapat menambah produktivitas kerja dengan mencapai hasil laporan keuangan yang baik dan benar. Diperlukan software khusus atau link dengan software akuntansi yang telah dimiliki berkaitan dengan jumlah angsuran, pembayaran, point setiap belanja baik di UKM dan di toko sehingga menjadi informasi penting untuk anggota beserta jumlah SHU yang akan diterima. Menurut Julaiyah (2016) dengan teknologi dapat mengurangi biaya produksi dan operasional, kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga memperoleh keuntungan yang besar dengan pengeluaran yang sedikit sehingga perusahaan dapat menambah jumlah produksi. Dengan teknologi dapat mempermudah komunikasi dan monitoring manajemen termasuk karyawan. Akses informasi dan penyebaran informasi serta publikasi berita melalui internet dapat tersebar luas dengan cepat bila dibandingkan dengan proses manual serta proses fax (bila masih ada). Jika komunikasi yang disampaikan cepat, fasilitas yang ada di internet dapat membuktikan kecepatannya berkomunikasi dengan orang yang dituju misalkan email.

3.3.Aspek Good Corporate Governance

Transparansi

Perwujudanan prinsip transparansi yang telah dilakukan oleh Koperasi SBW telah bersifat terbuka terhadap laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor akuntan Publik (KAP), berdasarkan pasal 30 UU.No.25 1992 sebelum laporan keuangan diaudit oleh KAP pasal d

menjelaskan pengurus dapat mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan ayat e pengurus menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris yang dilakukan secara tertib dengan dilakukannya audit atas laporan keuangan yang dilakukan KAP maka dapat menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan diantaranya pengurus, anggota koperasi investor maupun kreditor, serta prinsip koperasi ini telah menyelenggarakan sesuai dengan Pasal 40 dalam UU No. 25 tahun 1995 dimana koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

Transparansi diperlukan untuk sejauh mana aktivitas kegiatan organisasi dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus. Prinsip dasar transparansi berkaitan dengan kualitas yang disajikan berdasarkan informasi yang dibutuhkan oleh pengurus dan anggota koperasi dalam transparansi pengelolaan keuangan dan pembagian SHU yang diberikan kepada anggota. Menurut BAB X pasal 36 tentang pembukuan koperasi dijelaskan pada pasal 2 (dua) koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi koperasi khususnya serta standar akuntansi Indonesia pada umumnya. Dan pasal 3 (tiga) laporan tahunan pengawas dapat diaudit oleh akuntan public atas permintaan Rapat Anggota atau koperasi tidak megnangkat pengawas tetap, maka laporan tahunan pengurus harus diaudit oleh akuntan public sebelum diajukan kepada Rapat Anggota dan hasil audit menjadi perbandingan laporan pertanggungjawaban pengurus. Dari pembukuan koeprasi yang diatur dalam anggaran dasar telah sesuai dengan Pasal 30 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang isinya dapat menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, untuk itu transparansi dilakukan dalam mengembangkan secara khusus dokumentasi sistem informasi akuntansi sehingga transparansi dalam pengambilan kebijakan telah disesuaikan dengan prosedur dan kebijakan yang ada (Arifin.2005). Sedangkan menurut Ludigdo dan Puspitasari (2013) penyediaan transparansi dengan kemudahan akses dan dapat dipahami berasal dari informasi dan kebijakan dalam perusahaan (koperasi). Menurut Tadikapurry (2011:63) wujud nyata transparansi dalam mendukung GCG diantaranya keterbukaan dalam hal rapat-rapat, keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register dan keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Menurut Supriyanto (2011) Tata nilai tersebut berupa : Nilai Kebersamaan, dimana muncul disaat awal berdiri berdasarkan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yaitu megnatasi permasalahan ekonomi keluarga. Nilai kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran diperlukan dalam menyampaikan pendapat. Semkain tinggi tingkat kejujuran dan keterbukaannya, akan semakin akurat keputusan yang diambil dan resiko akan semakin bisa diminimalkan. Nilai ini juga ditanamkan kepada anggota yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan oleh seluruh anggota. Nilai saling percaya. Dengan nilai kejujuran dan keterbukaan yang telah ada munculah rasa saling percaya antar anggota koperasi. Nilai musyawarah. Nilai ini hasil dari kesepakatan dari seluruh kelompok anggota yang juga harus bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang ditimbulkan. Adanya pertemuan kelompok yang merupakan mekanisme dalam pengambilan keputusan yang secara bersama-sama menerima konsekuensi maka keputusan tersebut dapat ditanggung bersama. Sebelum pengambilan keputusan musyawarah dapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh sejumlah 50% + 1 anggota yang hadir disaat pertemuan yang ditandatangani bersama oleh seluruh anggota kelompok yang hadir. Nilai kedisiplinan anggota harus disiplin dalam menjalankan

aturan yang telah ditentukan koperasi maupun hasil kesepakatan dalam kelompok. Apabila terdapat anggota yang melanggar aturan, secara otomatis anggota yang lain akan mengikuti dampaknya yaitu pemberian sanksi. Sebagai contoh apabila salah satu anggota kelompok tidak hadir dalam pertemuan kelompok sehingga kewajiban angsuran juga tidak terbayar, sebagai akibat kewajiban anggota yang tidak membayar menjadi tanggungan bersama. Sehingga nilai tanggungjawab akan muncul dari setiap anggota baik dari diri anggota itu sendiri maupun kepada kelompoknya.

3.4.Independensi

Prinsip independensi dapat dikatakan mandiri dalam pengelolaannya yang sejalan berdasarkan visi “terwujudnya koperasi wanita setia bhakti wanita sebagai organisasi pembelajar yang handal dan tangguh, didukung oleh sumber daya manusia profesional yang mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi peningkatan kemampuan ekonomi maupun kesejahteraan anggotanya serta berbagai pihak lain yang terkait.

Kemandirian koperasi dapat terlihat dari kemampuan koperasi dalam menghimpun modal yang berasal dari para anggota, koperasi dikembangkan dari, oleh dan untuk anggota. Anggota harus membiayai setiap kebutuhan investasi dalam pengembangan usaha apalagi harus mengendalikan organisasinya dan memanfaatkan pelayanan koperasi (Sugiyanto,2013). Kemandirian koperasi memerlukan kreativitas yang tinggi untuk mengembangkan usaha dan menghasilkan laba yang tinggi. Tidak hanya kreativitas diperlukan, para pengurus dan anggota tentunya memerlukan terobosan yang **inovatif dengan bekerja sama dengan pihak instansi swasta untuk dapat** menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak luput pula dalam pengembangan koperasi pengurus perlu mengikuti pendidikan tentang koperasi dan bekerja sama antar koperasi, sebagai dasar pemahaman konsep dasar secara mendalam dan cara kerja koperasi mengembangkan diri dalam memperoleh keuntungan (laba) dan dapat mengelola koperasi dengan baik.

Pada anggaran dasar Koperasi SBW dijelaskan pada pasal 3 ayat e yang menyebutkan kemandirian. Pada prinsip koperasi yang terdapat dari pasal 5 ayat b pada UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Pengelolaan yang dilakukan secara demokratis dapat menampung berbagai saran dan ungkapan serta kepedulian anggota dalam **mengembangkan koperasi secara bersama-sama tanpa intervensi pihak lain dan secara bersama-sama mencari modal dari para anggota dan bekerja untuk menaikkan profit** dan kesejahteraan anggota. Menurut Permeneq BUMN tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pasal 3 ayat 4 mengatakan bahwa tata kelola yang baik dapat dikelola dengan profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola. Dengan prinsip independensi pengelolaan koperasi dapat dikelola secara efisien dan efektif serta dapat memberdayakan fungsi dan meningkatkan tanggungjawab serta kemandirian pengurus koperasi.

3.5.Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban struktur organisasi yang secara etis dikerjakan dalam kepengurusan setiap periode dan setiap tahun dalam rapat tahunan, seperti yang dikutip oleh Prinsip GCG menurut KNKG disampaikan bahwa

perusahaan (koperasi) dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar serta dikelola dengan benar, terstruktur sesuai dengan kepentingan pemegang saham (anggota koperasi) maupun kepentingan lain (investor).

Struktur organisasi diatur didalam AD/ART dapat menjelaskan tugas, fungsi tiap perangkat organisasi. Kesesuaian perangkat organisasi dan tugas serta fungsi telah diatur juga pada Anggaran dasar Koperasi SBW dimana perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas.

Pertanggungjawaban kerja pengurus telah dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Dimana AD/ART mengacu pada undang-undang perkoperasian dan pertanggungjawaban disampaikan pada rapat anggota tahunan (RAT) seperti yang telah diulas bahwa rapat tertinggi pada koperasi dilakukan pada saat RAT. Menurut prinsip GCG Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pasal 3 diatur mengenai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Berdasarkan peraturan menteri BUMN tersebut diakui bahwa anggota sebagai pemilik koperasi dan pengawas menginginkan pertanggungjawaban yang secara transparan dapat disampaikan dengan baik tanpa ditutup-tutupi.

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang dapat mengendalikan hubungan antar bagian dan unit-unit yang ada dengan pemberdayaan pengurus dengan dimonitoring langsung oleh pengawas dan anggota koperasi, dievaluasi dan dikendalikan oleh RAT dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi. Prinsip akuntabilitas menjadi prinsip perusahaan dalam sebuah misi untuk berkembang, bunyi Misi yang dimiliki koperasi berbunyi bersikap adil dan demokratis serta bekerja secara transparan dan akuntabel. Menurut pedoman pelaksanaan GCG KNKG kewajiban yang harus dilakukan oleh koperasi adalah rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai perusahaan dan strategi. Dari sudut pandang dan penilaian akan misi yang dimiliki bahwa koperasi ini telah mewujudkan visi dan misi tersebut dalam kehidupan dalam berorganisasi sehingga dimana akan datang tetap terus dapat semakin sehat, mandiri dan akuntabel serta berkembang.

3.6.Responsibility

Menurut Supriyanto (2011) Responsibility pada koperasi SBW terletak pada sistem tanggungrenteng dari seluruh anggota. Tanggung jawab bersama dalam sistem tanggungrenteng dijabarkan dalam mekanisme pertemuan kelompok yaitu pada komponen musyawarah. Sistem tanggungrenteng harus melalui proses musyawarah pada saat pertemuan kelompok yang berarti bahwa setiap anggota bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Dasar dari keputusan bersama merupakan konsekuensi yang di tanggung secara bersama.musyawarah tidak hanya terkait dengan pengambilan keputusan tentang besarnya nilai pinjaman. Tetapi terkait dengan penerimaan anggota baru, mengeluarkan anggota dan penyelesaian masalah kelompok. Proses tersebut dapat menumbuhkan keberanian mengemukakan pendapat anggota. Karena seluruh anggota dalam kelompoklah yang akan menanggung akibat dari keputusan yang salah. Sehingga setiap anggota akan terdorong untuk menyampaikan pendapat bila ketidak benaran dari keputusan

yang diambil dalam kelompoknya. Itulah sebabnya hadir dalam pertemuan kelompok menjadi kewajiban bagi seluruh anggota.

Prinsip Responsibilitas dapat juga dikembangkan pada setiap anggota masyarakat yang sebagai anggota masyarakat dalam mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Prinsip responsibilitas yang terdapat pada pedoman GCG dimana perusahaan (Koperasi) harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Dalam hal ini koperasi yang ada telah memenuhi aturan yang berlaku yaitu peraturan koperasi. Pada pedoman pokok pelaksanaan GCG mengenai responsibilitas perusahaan (koperasi) harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar. Dan perusahaan (koperasi) harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

3.7.Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)

Menurut Arifin (2005) menyampaikan bahwa prinsip kewajaran lebih menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas. Dengan prinsip kewajaran keanggotaan koperasi tidak ada perlakuan secara khusus dan memiliki hak-hak yang sama pada setiap anggota koperasi. Pada pedoman pelaksanaan Prinsip Fairness menurut GCG yang diatur dalam pedoman KNKG menyatakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

Dengan adanya prinsip yang sama berdasar hak dan kewajiban setiap anggota merupakan sumber daya manusia yang menjadi peran yang patut dihargai dalam perkembangan koperasi dalam pelopor pengelolaan bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan koperasi dituntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada para anggota yang baik, dikarenakan kompetitor antara koperasi satu dengan yang lain saling berkompetisi memperoleh anggota yang loyal dalam perkembangan koperasi, dengan demikian Prinsip *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran) pada GCG menurut KNKG memperoleh pendapat yang sama dimana pelaksanaan kegiatan perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasar asas kewajaran dan kesetaraan.

3.8.Penilaian aspek-aspek sistem informasi dan *Good Corporate Governance* pada Koperasi SBW

3.8.1.Sistem informasi masih belum menjadi prioritas mengikuti perkembangan jaman, diperlukan pemanfaatan teknologi agar dapat memudahkan semua dalam mendapatkan informasi dan menyebar informasi kepada seluruh anggota koperasi serta dapat digunakan dalam melakukan transaksi menggunakan kecanggihan teknologi. Kebermanfaatan teknologi dapat digunakan mulai dari pengurus, penanggungjawab, dan anggota menggunakan software yang bisa secara mobile dilakukan ditempat pertemuan kelompok dan dapat mempermudah transaksi simpan pinjam, pendaftaran, informasi mengenai tanggal jatuh tempo dan jumlah yang harus dibayar.

3.8.2. Informasi yang baik melalui website juga diperlukan agar komunikasi antar pengurus dan kegiatan yang ada dikoperasi dapat dijelaskan secara baik, sehingga pembaca yang bukan merupakan anggota koperasi memperoleh informasi yang informatif dan memastikan tata letak tampilan informasi tidak tumpang tindih dan berlebihan atau memiliki kesamaan judul. Informasi dapat mengajak kalayak luas yang belum bergabung menjadi anggota dalam memanfaatkan informasi melalui website.

3.8.3. Prinsip transparansi diperoleh nilai indeks 4,02 dapat terlaksana dengan baik. Transparansi pada laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan secara transparan disampaikan berkaitan segala aktivitas pengelolaan keuangan selama 1 periode (1 = satu tahun) dan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan.

3.8.4. Implementasi penerapan Independensi diperoleh nilai indeks 3,83 dalam pengelolaannya dapat dikatakan telah dikelola dengan baik. Independensi dalam membangun koperasi dihimpun melalui modal sendiri yang berasal dari anggota dengan pengembangan diri dari oleh dan untuk anggota dapat membiayai kebutuhan investasi dan mampu berkreasi dan berinovasi dalam persaingan antar koperasi serta dapat melayani masyarakat dengan baik.

3.8.5. Implementasi penerapan Akuntabilitas diperoleh nilai indeks 3,71 dalam tata kelola koperasi dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik. berkaitan dengan struktur organisasi yang dipertanggungjawabkan secara etis, dengan dilakukan pengawasan kinerja operational dalam pertanggungjawaban usaha, tanggungjawab pengurus bila anggota tidak lancar dalam melakukan pembayaran pinjaman serta bila ada penyalahgunaan uang operasional, melalaikan tugas, melakukan tugasnya tidak dengan hati-hati menjadi tanggungjawab bersama dan kinerja pengurus dapat dinilai dari keberhasilan laba dan peningkatan SHU serta jumlah anggota.

3.8.6. Implementasi penerapan responsibilitas diperoleh dengan nilai indeks 4,12 dalam tata kelola koperasi dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Prinsip responsibilitas dilakukan dengan ketaatan dalam peraturan perundang-undangan dimana peraturan mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan aturan AD/ART menjadi bagian dalam pengelolaan perkembangan koperasi dengan yang telah menjadi bagian dalam pelaksanaan tugas pengurus maupun anggota koperasi. Responsibilitas yang menjadi prinsip pada GCG dapat terlaksana dengan baik karena dukungan dari pengurus dalam pengambilan keputusan yang tepat yang dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu. Pelaksanaan dalam pemberian pinjaman lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman dan pengelolaan koperasi memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar dan kepada anggota koperasi.

3.8.7. Implementasi penerapan Fairness (kewajaran dan kesetaraan) diperoleh nilai indeks dalam pengelolaan koperasi sejumlah 3,94 dengan nilai tersebut dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Pengelolaan dan keanggotaan koperasi tidak membedakan unsur suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

3.8.8. Prinsip kewajaran dan kesetaraan yang diungkap adalah berkaitan dengan penerimaan anggota dapat dinilai dari unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) maupun gender serta kondisi fisik dari para anggota, pengelolaan koperasi dalam penyampaian saran dan pendapat dapat disampaikan kepada rapat anggota, kegiatan koperasi dapat meningkatkan nilai value dan meningkatkan citra kepada publik dalam jangka panjang, membangun

koperasi dengan tingkat kredibilitas bersama anggota, mitra dan stakeholder, dan peningkatan kinerja struktur organisasi berfungsi secara optimal berdasarkan standar kinerja tingkat koperasi.

4.Kesimpulan

4.1. Untuk menunjang sistem informasi penggunaan dalam pengolahan koperasi dibutuhkan teknologi yang mendukung dengan perangkat yang baik dalam mengoperasikan software dan hardware agar lebih berkembang dan produktifitas dalam pelaksanaan pengendalian intern yang efisien dan efektif dapat meningkat sehingga dapat menghasilkan meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi dan meningkatkan kinerja koperasi sesuai dengan prosedur dan pedoman. Perlunya integrasi data melalui pengembangan software mulai dari pendaftaran anggota, simpan pinjam, toko swalayan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana anggota dan dalam memudahkan pengambilan keputusan dan memudahkan informasi bagi para anggota. Transparansi keuangan yang disampaikan dengan tampilan atau space khusus didalam website <http://.setiabhaktiwanita.com> sehingga dapat memudahkan *stakeholder* memperoleh informasi yang valid atas keuangan koperasi setia bhakti wanita.

4.2. Pemanfaatan teknologi dengan bekerja sama dengan pihak Bank dalam melakukan e-banking guna memudahkan pembayaran anggota melalui e-banking dan terintegrasi dengan software kopwan SBW yang telah melakukan pembayaran. Prinsip transparansi dilakukan secara transparan dan disampaikan oleh pengurus berkaitan dengan pelaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan kedalam rapat anggota tahunan (RAT). Melalui prinsip transparansi terletak pada visi dan misi Koperasi SBW serta tata nilai yang merupakan salah satu dasar transparansi guna menghasilkan musyawarah pada koperasi.

4.3. Prinsip independensi terlaksana dengan secara baik dengan kemandirian pengelolaan koperasi yang dihimpun oleh anggota menjadikan modal awal dalam menginvestasikan dananya untuk membangun koperasi SBW yang dapat mendukung kesejahteraan anggota selaras dengan visi dan misi yang menjadi tujuan dari koperasi. Perlunya terobosan baru untuk memajukan koperasi untuk tetap eksis berkembang di era digital dan melalui independensi pengurus dapat menambah kegiatan guna menambah kesejahteraan anggota melalui SHU. Prinsip akuntabilitas terlaksana dengan baik, mengikuti aturan AD/ART yang didalamnya meliputi visi dan misi dan mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 1992 membuktikan bahwa pertanggungjawaban terhadap aturan yang berlaku dilaksanakan dengan baik dan dapat dikondisikan sesuai dengan kondisi koperasi.

4.4. Pengelolaan prinsip responsibilitas secara sistematis mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan tiap tahun koperasi melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan tarif pajak yang berlaku untuk pada koperasi. Tidak adanya unsur SARA dalam pengelolaan koperasi maupun dalam penerimaan keanggotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldridge, Jhon E dan Siswanto Sutojo. 2008. *Good Corporate Governance*. Jakarta. Damar
- Ahmadi, 2005, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, Univ. Negeri Malang
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Ed. Revisi VI. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Arifin. 2005. *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip GCG pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*. Universitas Diponegoro.
- Atmoko, Tjipto. 2016. Standar operaional prosedur (SOP) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (<http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/BX32jRZz1284857253.pdf> ; tampilan PDF diakses tgl. 20 Agustus 2017)
- Ardi, Bagus Kusuma. 2013. Pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap perkembangan sistem informasi akuntansi. *Jurnal Ekonomi* No. 38/Thxx/Oktober 2013. STIE. Dharmaputra Semarang
- Bannock, Graham, R. E. Baxter dan Evan Davis. 2004. *A Dictionary of Economics*. Inggris: Penguin Books Ltd. link website : https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi (diakses Tgl. 27-Feb-2016 : pk 13.00)
- Bungin, Burhan H.M. 2007. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan ilmu Sosial*. Jakarta. Kencana Prenama Media Group
- BPS. 2016. *Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi, 2006-2014*. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/1314> (diakses tgl. 26 Februari 2016 : pk. 07.56)
- Diknas, 2008, *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan*, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional
- Emi Julaikah. 2016. Manfaat teknologi informasi dibidang bisnis. (link http://www.kompasiana.com/emijulaikah/manfaat-teknologi-informasi-di-bidang-bisnis_57492108337b61ad0f7fa86a ; diakses tgl. 20 Agustus 2017)
- Ferlinda, Ekky Dwi, Heru Ribawanto, Siswidiyanto. 2008. *Implementasi Good Corporate Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan* (studi pada PT. Telkom Banyuwangi). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1. NO. 4. Hal.22-30. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang
- Faidah Siti Nur & Retno Mustika Dewi. 2017. Penerapan sistem tanggungrenteng sebagai upaya mewujudkan partisipasi aktif anggota dan perkembangan usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur

- Haryono Aan. 2017. Jalan Kencang Koperasi Wanita. E-Koran Sindo ([http://koran-sindo.com/page/news/2017-05-28/4/25/Jalan Kencang Koperasi Wanita](http://koran-sindo.com/page/news/2017-05-28/4/25/Jalan_Kencang_Koperasi_Wanita) ; diakses tgl. 20 Agustus 2017)
- Iskandar dan Suryono. 2015. *Analisa Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Pengendalian Internal*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 4. No. 10. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)
- James A. O Brien, George M. Marakas. 2013. Sistem Informasi Manajemen (management Information System). Edisy 9. Buku 1. Salemba Empat.
- KNKG. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol.8.No. 1.Maret. Universitas Kristen Petra
- Purno, Bambang Listyo. 2013. *Pengaruh mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan*. (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2011)
- Puspitasari dan Ludigdo. 2014.*Good Governance of Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur*. Universitas Brawijaya
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 12/Per/M .KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill
- Purno, Bambang Listyo. 2013. *Pengaruh Mekanisme Good Governance terhadap Kinerja Perbankan* (Studi pada Perusahaan yang terdaftar di BEI Periode 2009 – 2011). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 20?per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi
- Purwanto, Agus. 2005. Sistem keamanan computer dengan membatasi hak akses dan penggunaan password. Jurnal Penelitian Infokam No.1/Th.1/2005

- Rakhmat Agung dan Erwin Saraswati. 2013. *Good Corporate Governance (GCG) sebagai prinsip implementasi Corporate Sosial Responsibility (CSR)*. FEB UB
- Retno, Reny Dyah dan Denies Priantinah. 2012. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility terhadap nilai perusahaan (Studi Empiris pada perusahaan yang terdaftar diBursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)*. Jurnal Nominal/Volume 1 No. 1/ Tahun 2012. FE Universitas Negeri Yogyakarta
- Sudarto. 2015. *Pembinaan koperasi, peran pemerintah perlu dipertajam*. <http://sultengpost.com/?p=10004> (diakses tgl. 26 Februari 2016 : pk. 08.00)
- Sidh, Rahmahwati. 2013. Peranan Brainware dalam sistem informasi manajemen. *Jurnal Computect & Bisnis*. Vol. 7. No. 1. Juni 2013
- SBY. 2013. *Dengan Koperasi, Ekonomi akan Tumbuh Adil dan Merata*. <http://hot.detik.com/read/2013/07/12/185931/2301367/4/sby-dengan-koperasi-ekonomi-akan-tumbuh-adil-dan-merata> (Diakses tgl. 26 Feb 2016 : pk. 8.32)
- _____. 2014. *SBY Diberi Gelar Bapak Penggerak Pembangunan Koperasi*. <http://news.detik.com/berita/2638137/sby-diberi-gelar-bapak-penggerak-pembangunan-koperasi> (diakses tgl. 26 Feb 2016 : pk. 8.30)
- Supriyanto. 2015. *Tata Kelola. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam*. Andi Offset
- Santosa, Djohari. 2008. *Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan Publik diIndonesia*. *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 15 April. FH UII Yogyakarta
- Subagyo, Ahmad. 2016. *Koperasi diantara LKD dan Laku Pandai*. <http://www.ahmadsubagyo.com/wp-content/uploads/2016/01/artikel-koperasi-info-bank-jan-2016-p.2.pdf> (diakses tgl. 1 Maret 2016 :pk. 20.00)
- Subagyo, Ahmad. 2016. *Menuju Tata Kelola Koperasi yang berkelanjutan*. <http://www.stekpi.ac.id/informasi/datas/users/1/slide%20tata%20kelola%20koperasi%20berkelanjutan.pdf> (Diakses Tgl. 1 Maret 2016 : Pk. 20.05)
- Susanto, Bob. 2015. *Koperasi menurut para ahli*. <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/03/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli-terlengkap.html> (diakses tgl. 1 Maret 2016 : pk. 15.00)
- Schwarz. Eric. *Memenangkan Persaingan Bisnis dalam memberdayakan Solusi Teknologi Informasi*. <http://chiez.blogstudent.mb.ipb.ac.id/author/chiez/> (Diakses Tgl. 29 Mei 2016 : Pk.00.10)
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta. UNS

- Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta
- Sugiyanto. 2013. *Jati Diri Koperasi Indonesia, Proceeding seminar dan diskusi nasional*.
Institut Koperasi Indonesia
- Tejo, Nurseto. 2008. *Prinsip-prinsip dan penjenisan koperasi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. 2008. *Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia kedepan : Masih relevankah koperasi didalam era modernisasi ekonomi*. Pusat Studi Industri dan UKM. Jakarta. Universitas Trisakti
- Taufiq Muhammad. 2017. Pengaruh teknologi informasi dalam keprofesian dan omplikasinya dalam dunia pendidikan. *Jurnal Naturalistic*. Jurnal penelitian pendidikan dan pembelajaran I, No 176-185. Universitas Muhammadiyah tasikmalaya.
- Tadikapurry, Violetta Jingga. 2011. *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Bank X, Tbk*. Kanwil X. Universitas Hasanuddin
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Wati, Like Monisa. 2012. *Pengaruh praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Manajemen*. Vol.1-No.1. September 2012. Universitas Negeri Padang

ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KOPERASI (PENDEKATAN SISTEM INFORMASI STUDI KASUS KOPERASI SETIA BHAKTI WANITA di SURABAYA)

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

2%

2

eprints.undip.ac.id

Internet Source

2%

3

virgo-pendidikan.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%